



FORPI USUL PERKETAT PENGAWASAN Dana Kelurahan Tahap II Siap Dicairkan

YOGYA (KR) - Dana kelurahan tahap II dari pemerintah pusat sudah siap untuk dicairkan. Alokasi sebesar sekitar Rp 7,9 miliar tersebut sudah masuk ke rekening kas daerah dan tinggal disalurkan sesuai dengan program dari tiap kelurahan.

Masing-masing kelurahan mendapat jatah Rp 352 juta yang dicairkan dalam dua tahap. "Separuhnya sudah dicairkan pada tahap pertama. Yang tahap kedua ini juga sudah siap cair. Nanti pencairannya tergantung dari tata kala di masing-masing kelurahan," jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, Senin (29).

Pada tahap pertama, dana kelurahan dicairkan pada triwulan pertama sebesar Rp 7,72 miliar untuk 45 kelurahan. Realisasinya hingga pertengahan Juli sudah digunakan sebanyak Rp 4,1 miliar untuk membiayai berbagai kegiatan fisik

dan nonfisik di tiap kelurahan. Sedangkan teknis pemanfaatan pada tahap kedua juga tidak berbeda dengan tahap pertama.

Sementara itu, Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya Baharudin, mengusulkan agar Pemkot memperketat pengawasan terkait pengelolaan dana kelurahan. Hal ini lantaran kebijakan dana kelurahan baru direalisasikan tahun ini.

"Pengawasan dana kelurahan sangat diperlukan guna mengantisipasi penyelewengan oleh oknum aparat sipil negara (ASN)," usulnya.

Dalam penggunaannya, dana kelurahan dikururkan ke anggaran kecamatan. Selanjutnya, kelurahan mengajukan proposal sesuai perencanaan kegiatan ke kecamatan. Dengan begitu, camat dan lurah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam penggunaan dana kelurahan. "Kegiatan yang digulirkan harus

mampu melibatkan unsur masyarakat. Jangan sampai ada dominasi dari perangkat kelurahan dalam menentukan kegiatan," jelasnya.

Sedangkan Lurah Giwangan Anggit Safrudin, mengatakan dana kelurahan tahap kedua akan ia prioritaskan untuk pekerjaan fisik. Pasalnya, kegiatan non-fisik atau pemberdayaan masyarakat sudah digencarkan melalui dana kelurahan tahap pertama. Sejumlah pekerjaan fisik yang akan dilakukan pada tahap kedua adalah pembangunan jalan konblok, saluran air hujan dan rehabilitasi fasilitas umum.

Dirinya pun mengusulkan agar ada tambahan tenaga di kelurahan yang khusus menangani administrasi atau keuangan. Terlebih pada tahun depan akan ada peningkatan dana yang dikelola kelurahan yaitu lima persen dari pendapatan asli daerah (PAD). (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005